

TATA RUANG KOTA

SOSIOLOGI PERKOTAAN

ARIS MARTIANA



Perubahan kota (tempat tinggal, kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan)



Tata kota



Tujuan : mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam proses pembangunan berkelanjutan peran serta masyarakat dengan kearifan lokalnya perlu diberikan tools dan mekanisme yang jelas.

PROBLEM TATA RUANG KOTA







UU No. 26 Tahun 2007 : PERENCANAAN, RUANG DAN TATA RUANG

RUANG

- Wadah: darat, laut, dan udara serta ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupan

Rencana tata ruang

- rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang pada kemudian hari

Tata ruang

wujud dari struktur ruang dan pola ruang

struktur ruang

susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hirarkis.

pola ruang

Distribusi peruntukan ruang yakni untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya

TATA RUANG



keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, air, udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antarkepentingan yang berbeda

(eko Budihardjo, 1997 dalam buku Adon Nasrullah, 2015)



PERENCANAAN TATA RUANG

- ▶ Ilmu ilmiah, teknik administrasi dan kebijakan yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antarilmu yang mengarah pada sebuah keteraturan ruang (european regional spatial planning charter, 1983)
- ▶ Cara meningkatkan Kualitas perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup :
 1. Dilihat sebagai management of growth atau management of changes dan management of conflicts.
 2. Mekanisme development control ketat
 3. Dilakukan dengan total menyeluruh dengan berbagai pendekatan
 4. Peningkatan kepekaan sosiokultural para penentu kebijakan
 5. Memperhatikan kekayaan khazanah lingkungan alam
 6. Peran serta penduduk dan kemitraan swasta
 7. Prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dalam rencana dan tindakan nyata.

PERAN DAN FUNGSI PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA

**Menghasilkan
kondisi pencapaian
kualitas kehidupan
dan penghidupan
lebih baik**

**Memenuhi tujuan
efisiensi dan
demokrasi melalui
partisipasi
masyarakat**

**Memenuhi
tantangan
pembangunan
berkelanjutan**

FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

1. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan jangka menengah daerah
2. Acuan dalam pemanfaatan atau pengembangan wilayah
3. Acuan wujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah
4. Acuan lokasi investasi
5. Pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang
6. Dasar pengendali pemanfaatan ruang
7. Acuan dalam administrasi pertanahan

TUJUAN PERENCANAAN TATA RUANG

SECARA UMUM :

1. Menggapai visi masa depan brdasar kondisi saat ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat
2. Mencapai kebijakan dan program yang memanfaatkan sumber daya publik
3. Menciptakan kerangka kerja investasi swasta

MENURUT UU No. 26 tahun 2007 :

1. Terwujudnya keharmonisan antaralingkungan alam dan buatan
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SDA dan SD buatan dengan melihat SDM
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

PENGEMBANGAN WILAYAH

1. ERA 1970-an, SUTAMI : pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi SDA
2. Era transisi, Poernomosidhi : konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui orde kota
3. Era 1980-an, Ruslan Diwiryono : adanya sistem kota nasional yang efisien
4. Era 1990-an, untuk mengatasi kesenjangan wilayah dan mewujudkan integrasi NKRI.

KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH

Pusat pertumbuhan :
investasi besar
dipusat
pertumbuhan yang
telah mempunyai
infrastruktur yang
baik

Integrasi nasional :
Kota sebagai pusat
pelayanan relatif
terhadap kota yang
lain

Desentralisasi :
untuk mencegah
terjadinya aliran
keluar dari sumber
dana dan SDM

PENYUSUNAN TATA RUANG KOTA

Kebijaksanaan penataan wilayah dalam pola tata ruang :

- 1. Rencana umum tata ruang kota (RUTK) :** rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur dan strategi pengembangan kota, kebijaksanaan pengembangan kota, pengelola pembangunan kota.
- 2. Rencana Detail Tata ruang Kota (RDTK) :** rencana secara terinci berisi kebijakan pengembangan penduduk, pemanfaatan ruang, tingkat pelayanan bagi wilayah kota,
- 3. Rencana Teknik ruang Kota (RTRK) :** rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang mencakup satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan.

KAWASAN PERKOTAAN

bagian dari daerah kabupaten

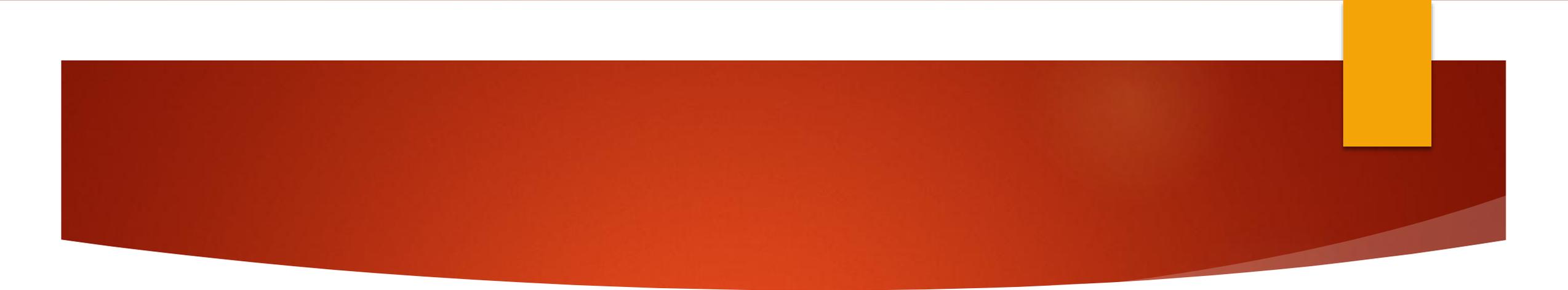
perkotaan yang baru

administratif daerah kota

bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

KAWASAN BUDI DAYA PERKOTAAN :

1. Perumahan dan permukiman (tidak berada di kawasan rawan bencana, kemiringan tanah relatif datar, bukan kawasan yg dilindungi)
2. Perdagangan dan jasa (relokasi pasar, pemerataan fasilitas perdagangan, lokasi PKL)
3. Industri (berwawasan lingkungan)
4. Pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, perkantorsn dan transportasi/terminal) :
5. Wisata dan taman rekreasi
6. Pertanian dan perkebunan
7. Tempat pemakaman umum
8. Tempat pembuangan sampah.



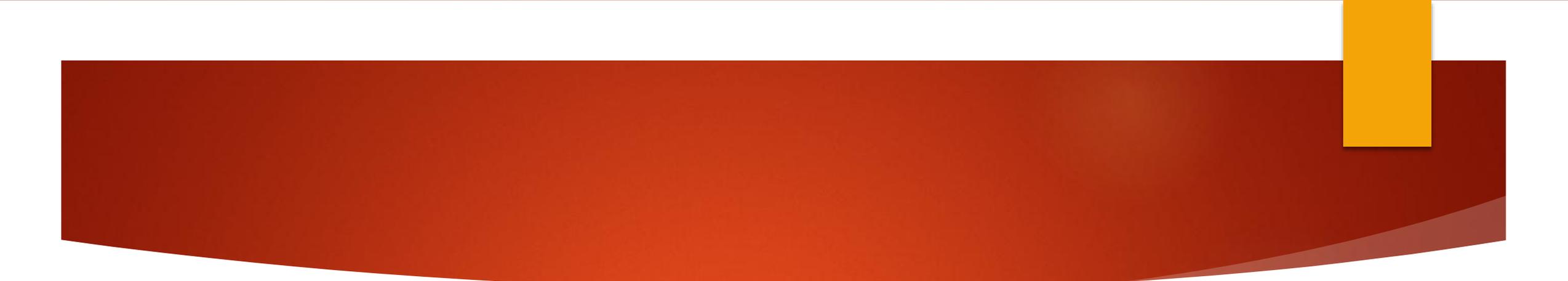
STRUKTUR PEMERINTAHAN KOTA

GOOD GOVERNANCE

- ▶ **PEMERINTAHAN YANG BAIK**
- ▶ **Tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai tindakan dalam kehidupan keseharian.**
- ▶ **Negara, swasta, dan masyarakat madani (civil society) saling berkontribusi**

DESENTRALISASI

- ▶ Dalam pasal 18 UUD 1945, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desentralisasi
- ▶ Pengertian : adanya transfer kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada publik dari pempus ke pemda
- ▶ Alasan desentralisasi
 1. Sistem sentralistik (jakarta sebagai pusat)
 2. Pembagian kekayaan tidak adil dan merata
 3. Kesenjangan sosial antara daerah-daerah



▶ **TUJUAN DESENTRALISAsi dan otonomi daerah**

- 1. UTK TERCIPTANYA EFISIENSI-EFEKTIFITAS penyelenggara pemerintahan**
- 2. Sarana pendidikan politik**
- 3. Pemda sebagai persiapan karir politik lanjutan**
- 4. Stabilitas politik**
- 5. Kesetaraan politik**
- 6. Akuntabilitas publik (kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai): kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggungjawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi)**

OTONOMI DAERAH

- ▶ Secara sempit pengertian otonomi : mandiri, secara luas : berdaya
 - ▶ Hak dan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri
- semua bidang kecuali :
1. Politik luar negeri
 2. Pertahanan
 3. Keamanan
 4. Yustisi
 5. Moneter dan fiskal nasional
 6. agama

